



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI (S1)
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (S1)
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PRAKTEK LAPANGAN
KEPENDIDIKAN-ASISTENSI MENGAJAR DALAM KERANGKA
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 0934/UN35.3/KS/2024

Nomor : 420/263/2/DPK-LK/1-2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-01-2024)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Afri Efendi, S.Pd. SD., MM.** : Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Sarilamak, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1), Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1), Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi Dan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar Dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar Dalam Kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Program Magang Mahasiswa MBKM;
3. Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar;
4. Pengembangan Kurikulum; dan
5. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar dalam kerangka MBKM ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar di bawah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1), Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1), Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang.

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melakukan seleksi kepada mahasiswa;
 - b. Memberikan data mahasiswa;
 - c. Menyediakan Dosen Pembimbing;

- d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama kegiatan Asistensi Mengajar;
 - e. Menerima penilaian mahasiswa dari Pembimbing Sekolah.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan Praktek Lapangan Kependidikan-Asistensi Mengajar;
 - b. Menyediakan Pembimbing Sekolah;
 - c. Pembimbing Sekolah memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Universitas Negeri Padang
Up. : Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama (DPKS)
Telp : 0751-7058692
Email : kerjasama@unp.ac.id
Alamat : Gedung Rectorate and Research Center Universitas Negeri Padang,
Lantai I, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang,
Sumatera Barat 25131

PIHAK KEDUA

Nama : AFRI EFENDI, S.Pd.SD, M.M
Telp/Hp : 082391540448
Email : afriefendi.af@gmail.com
Alamat : Baruah Gunuang

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

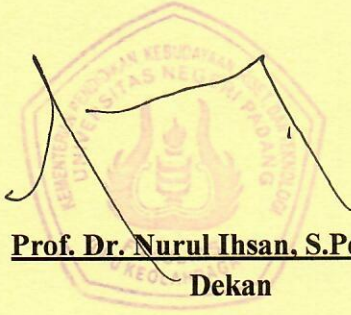

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd
Dekan

PIHAK KEDUA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Afri Efendi, S.Pd.SD., M.M.
Kepala Dinas